



**PENGARUH TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS
PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN PADA OPD DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

RAHMADI
NPM 1615100060

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RAHMADI
NPM : 1615100060
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS
PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN PADA OPD DI KOTA MEDAN

MEDAN, 16 OKTOBER 2020

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. RAHIMA BR PURBA, S.E., M.Si, Ak., C.A)



(Dr. BAMBANG WIDIANARJO, S.E., M.M)

PEMBIMBING I

(Dr. RAHIMA BR PURBA, S.E., M.Si, Ak., C.A)

PEMBIMBING II

(FITRI YANI PANGGABEAN, SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : RAHMADI
NPM : 1615100060
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS
PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN PADA OPD DI KOTA MEDAN

MEDAN, 16 OKTOBER 2020



(DR. ADITA DARMA NST, SE., M.Si) (Dr. RAHIMA BR PURBA, S.E., M.Si, Ak., C.A)

ANGGOTA - I

ANGGOTA - II

(FITRI YANI PANGGABEAN, SE., M.Si)

ANGGOTA - III

(VINA ARNITA, SE., M.Si)

ANGGOTA - IV

(WAN FACHRUDDIN, S.E., M.Si., Ak., CA)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : RAHMADI
NPM : 1615100060
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS / AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS
PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN PADA OPD DI KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 16 Oktober 2020



(Rahmadi)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmadi
Tempat/Tanggal lahir : Mulyorejo, 06 Mei 1998
NPM : 1615100060
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Dusun XII Jl. Setia No.40 A

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 16 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



(Rahmadi)

Acc Jilid Lux
21/10/2020



20/08/2021


**PENGARUH TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS
PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN PADA OPD DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

RAHMADI
NPM 1615100060

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : RAHMADI
NIM : 1615100060
Tempat/Tgl. Lahir : Mulionejo / 06 Mei 1998
Alamat : Dusun XII Jl. Setia No. 40 A
No. HP : 085261760814
Nama Orang Tua : TUKINO/SUSI ANTI
Bidang : SOSIAL SAINS
Bidang Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada OPD Di Kota Medan

Saya dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



RAHMADI
1615100060



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax, 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILAHU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap : RAHMADI
 Tempat/Tgl. Lahir : MILYOREJO / 06 Mei 1998
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100060
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 119 SKS, IPK 2.91
 Nomor Hp : 082365684049
 Dengan ini mengajukan Judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Pengaruh transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada skpd di kota Medan.O

Catatan: Tesis Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

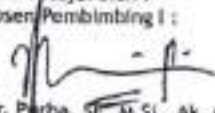
Coret Yang Tidak Perlu


 (Bhayik Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 21 September 2019
 Pemohon,

 (Rahmadi)

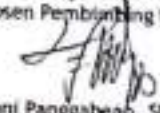
Tanggal :
 Disetujui oleh :

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Rahima br. Perba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Junawan, SE., M.Si.)

Tanggal : 21/09/2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si.)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Sabtu, 21 September 2019 10:26:53



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.
Email : admin_fe@umpab.pancabudi.org <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL


UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : Sosial Sains
 Dosen Pembimbing I : Rahima Br. Purba, S.E., M.Si, Ak., C.A.
 Nama Mahasiswa : Rahmadi
 Jurusan / Program Studi : Akuntansi
 No. Stambuk / NPM : 1615100060
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Proposal : Pengaruh ^{publik} transparansi ~~publik~~ dan aktivitas, pengendalian terhadap ^{keandalan} ~~keandalan~~ keuangan pada opd di kota Medan.

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
14/1-2020	fenomena - identifikasi masalah Rumusan Masalah - Hipotesis Kerangka	<i>SR</i>	
10/2-2020	Teori & Metodologi	<i>SR</i>	
25/2-2020	Acc Seminar Proposal	<i>SR</i>	

Medan,
Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing I


Rahima Br Purba, S.E., M.Si, Ak., C.A



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS


Jln. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 30106060 PO BOX.1099 Medan,

Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org

<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIV / PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing II : Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : RAHMADI
 Jurusan / Program Studi : AKUNTANSI
 No. Stambuk / NPM : 115100060
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Proposal : Pengaruh transparansi publik dan aktivitas pengabdian
 terhadap akuntabilitas perusahaan pada opd di Kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
10/03 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Cover - Daftar isi - Daftar tabel - Daftar Gambar - Sistematika penulisan setiap Bab - Referensi 10 tahun (2010) - Bahasa asing (Basis miring) - Tabel Abstrak proses penelitian - Operasionalisasi variabel - Mapping penelitian sebelumnya - Kerangka konseptual - Daftar pustaka (sesuai abjad / panchuan). 		

Medan,
Diketahui / Disetujui Oleh :
Dekan


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II


Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : admin_fe@unpab.pancabudi.org

<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : Sosial Sains
 Dosen Pembimbing II : Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : Rahmadi
 Jurusan / Program Studi : Akuntansi
 No. Stambuk / NPM : 1615100060
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Proposal : Pengaruh transparansi publik dan akuitas pengendaraan terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di kota Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
08/04 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Cover - Subjektivitas pemilih setiap kali - Gambar kerangka konseptual - Daftar isi & Gambar - Kejelasan - Daftar pustaka - Mapping penelitian terdahulu - tabel studi penelitian - landasan teori - Referensi terdahulu tahun 2010 (10 tahun) 		

Medan,
 Diketahui / Disetujui Oleh :
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II

Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.

Email : admin_fe@unpab.pancajadi.org

<http://www.pancajadi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIV / PTS : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : Sosial Sains
 Dosen Pembimbing II : Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si
 Nama Mahasiswa : Rahmad
 Jurusan / Program Studi : Akuntansi
 No. Stambuk / NPM : 1615.1000.60
 Jenjang Pendidikan : Strata I
 Judul Proposal : Pengaruh transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada apd di kota Medan.

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
08/05 2020	- Daftar pustaka - Keahlian - paparan & sample - Uclay / pengap. rencana / Renda.		
	<p>Atas Seminar proposal</p> <p></p> <p>10/05 2020</p>		

Medan,
 Diketahui / Disetujui Oleh :
 Dekan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



Dosen Pembimbing II

Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3050/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/:

Nama : RAHMADI
NIM : 1615100060
Kelas/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Akuntansi

sejak tanggal 12 September 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 12 September 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Plagiarism Detector v 1.0.0 - Originality Report 08/22/20 11:07:30

Original document: Hairnol_161510010_Aurora.docx - 100% match with Universitas Pembangunan Pajene.docx (UPEP1603)
Comparator: Thesauri Revisi, Detected language: Indonesian



Source	Match	Match %	Match Count	Match Text
Source 1	Match	100%	1	Universitas Pembangunan Pajene
Source 2	Match	100%	1	Universitas Pembangunan Pajene
Source 3	Match	100%	1	Universitas Pembangunan Pajene
Source 4	Match	100%	1	Universitas Pembangunan Pajene
Source 5	Match	100%	1	Universitas Pembangunan Pajene
Source 6	Match	100%	1	Universitas Pembangunan Pajene
Source 7	Match	100%	1	Universitas Pembangunan Pajene
Source 8	Match	100%	1	Universitas Pembangunan Pajene
Source 9	Match	100%	1	Universitas Pembangunan Pajene
Source 10	Match	100%	1	Universitas Pembangunan Pajene

Show other sources

Send to my Computer

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



ABSTRAK

Analisis penelitian untuk mengetahui apakah transparansi publik berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan. Apakah aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan. Apakah transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan. Data yang digunakan adalah laporan tahunan dari masing-masing perusahaan sampel, yang dipublikasikan melalui website www.idx.go.id. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif, dengan pengujian asumsi klasik dan regresi linier berganda. Sampel sebanyak 30 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan. Aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan. Transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan.

Kata Kunci : Transparansi Publik, Aktivitas dan Akuntabilitas Keuangan

ABSTRACT

Research analysis to find out whether public transparency influences financial accountability in OPD in Medan. Does controlling activity affect financial accountability in OPD in Medan. Does public transparency and control activities simultaneously influence financial accountability in OPD in Medan. The data used are annual reports from each sample company, which are published through the website www.idx.go.id. The analytical method used in this study is the associative method, with the testing of classical assumptions and multiple linear regression. Samples were 30 respondents. The results of this study indicate that public transparency has a positive and significant effect on financial accountability in OPD in Medan. Control activities have a positive and significant effect on financial accountability in OPD in Medan. Public transparency and control activities have a positive and significant effect simultaneously on financial accountability in OPD in Medan..

Keywords : Public Transparency, Activities and Financial Accountability

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada OPD di Kota Medan”** ini dengan baik, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu peneliti selama menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan SE., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak Dr. Bambang Widjanarko., S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Rahima Br Purba, S.E., M.Si, Ak., C.A., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Dr. Rahima Br Purba, S.E., M.Si, Ak., C.A, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis.
7. Kepada teman-temanku, terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, Oktober 2020
Penulis

Rahmadi
1615100060

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	2
1.3 Perumusan Masalah	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Tujuan Penelitian	4
1.4.2 Manfaat Penelitian	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	7
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	12
2.3 Kerangka Konseptual.....	14
2.4 Hipotesis	16
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	18
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	18
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	18
3.2.2 Waktu Penelitian.....	18
3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	19
3.3.1 Populasi.....	19
3.3.2 Sampel.....	19
3.3.3 Jenis dan Sumber Data.....	20
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	20
3.4.1 Variabel Penelitian.....	20
3.4.2 Definisi Operasional	20
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.6 Teknik Analisis Data.....	22

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Hasil Penelitian	27
	4.1.1 Sejarah Pemerintahan Kota Medan.....	27
	4.1.2 Deskripsi Karakteristik Responden.....	29
	4.1.3 Penyajian Data	31
	4.1.4 Deskripsi Karakteristik Responden.....	29
	4.1.5 Analisis dan Evaluasi	42
	4.1.6 Regresi Linier Berganda	45
	4.1.7 Pengujian Hipotesis	49
	4.1.8 Uji Kesesuaian (<i>Test Goodness Of Fit</i>)	50
	4.2 Pembahasan.....	52
	4.2.1 Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan	52
	4.2.2 Pengaruh Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan.....	53
	4.2.3 Pengaruh Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan ..	54
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	5.1 Kesimpulan	55
	5.2 Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya	12
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	17
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel	18
Tabel 3.3 Daftar Sampel di OPD Kota Medan	20
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	30
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	30
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	31
Tabel 4.5 Pernyataan X _{1.1}	32
Tabel 4.6 Pernyataan X _{1.2}	32
Tabel 4.7 Pernyataan X _{1.3}	33
Tabel 4.8 Pernyataan X _{1.4}	34
Tabel 4.9 Pernyataan X _{1.5}	34
Tabel 4.10 Pernyataan X _{1.6}	35
Tabel 4.11 Pernyataan X _{1.7}	35
Tabel 4.14 Pernyataan X _{2.1}	36
Tabel 4.15 Pernyataan X _{2.2}	37
Tabel 4.16 Pernyataan X _{2.3}	37
Tabel 4.17 Pernyataan X _{2.4}	38
Tabel 4.18 Pernyataan X _{2.5}	38
Tabel 4.23 Pernyataan Y.1	39
Tabel 4.24 Pernyataan Y.2	40
Tabel 4.25 Pernyataan Y.3	40
Tabel 4.26 Pernyataan Y.4	41
Tabel 4.27 Pernyataan Y.5	41
Tabel 4.32 Uji Validitas X ₁ (Transparansi Publik)	42
Tabel 4.33 Uji Validitas X ₂ (Aktivitas Pengendalian).....	43
Tabel 4.34 Uji Validitas Y (Akuntabilitas Keuangan).....	43
Tabel 4.35 Uji Reliabilitas X ₁ (Transparansi Publik)	44
Tabel 4.36 Uji Reliabilitas X ₂ (Aktivitas Pengendalian).....	44

Tabel 4.37 Uji Reliabilitas Y (Akuntabilitas Keuangan).....	44
Tabel 4.39 Uji Multikolinearitas	47
Tabel 4.40 Regresi Linier Berganda	49
Tabel 4.41 Uji Simultan	50
Tabel 4.42 Uji Parsial.....	51
Tabel 4.43 Uji Determinasi.....	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	15
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	45
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas	46
Gambar 4.3 <i>Scatterplot</i> Uji Heteroskedastisitas	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, warga negara yang semakin kritis dan cerdas menginginkan terciptanya suatu pemerintahan yang transparansi serta pengawasan internalnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Mengelola keuangan negara, dibutuhkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian dari sistem pengendalian intern dimana sebagai proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Masalah yang menyangkut mengenai transparansi publik yaitu yaitu masih terdapat OPD di Kota Medan yang belum mengimplementasikan transparansi tersebut seperti dalam hasil laporan, sehingga sampai saat ini masyarakat masih merasakan belum optimalnya kinerja OPD di Kota Medan dalam memberikan pelayanan publik. Aktivitas pengendalian yaitu kenyataannya selama ini kinerja anggaran dalam proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan APBD serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), masih belum terealisasi sehingga perhatian lebih berfokus pada besarnya anggaran. Kinerja anggaran lebih mengutamakan penyerapan anggaran sehingga banyak anggaran digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, terjadi ketidakefisiensi anggaran, dan banyak penggunaan anggaran yang menyimpang dengan tujuan atau target kebijakan pemerintah, dimana pada tahun SiLPA tahun anggaran 2019 sebesar Rp.67.316.909.942. Hal ini menjadikan anggaran tidak efektif atau bahkan tidak terserap sepenuhnya saat tahun anggaran berakhir, dan berdampak pada tingginya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), dimana dana yang seharusnya dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ternyata tidak terserap sepenuhnya. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--walikota-medan-akui-masih-banyak-persoalan-pelayanan-publik>.

Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas maka peneliti berniat untuk meneliti tentang seberapa besar “Pengaruh Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada OPD di Kota Medan”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang akan dibahas penulis yaitu :

- a. Dinas pekerjaan umum dan dinas sosial di Kota Medan yang belum mengimplementasikan transparansi tersebut seperti dalam hasil laporan, sehingga sampai saat ini masyarakat masih merasakan belum optimalnya kinerja OPD di Kota Medan dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Selama ini kinerja anggaran dalam proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan APBD serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), masih belum terealisasi sehingga perhatian lebih berfokus pada besarnya anggaran. Kinerja anggaran lebih mengutamakan penyerapan anggaran sehingga banyak anggaran digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, terjadi ketidakefisiensi anggaran, dan banyak penggunaan anggaran yang menyimpang dengan tujuan atau target kebijakan pemerintah, dimana pada tahun SiLPA tahun anggaran 2019 sebesar Rp.67.316.909.942. Hal ini menjadikan anggaran tidak efektif atau bahkan tidak terserap sepenuhnya saat tahun anggaran berakhir, dan berdampak pada tingginya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), dimana dana yang seharusnya dapat digunakan

untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ternyata tidak terserap sepenuhnya.

1.2.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasannya tidak menyimpang maka penulis membatasi pembahasan masalah hanya pada pengaruh transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah transparansi publik berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan?
2. Apakah aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan?
3. Apakah transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah transparansi publik berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan.

- b. Untuk mengetahui apakah aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui apakah transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintahan, sebagai masukan dalam pengaruh transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan.
- b. Bagi penulis, ini diharapkan dapat memberikan menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan.
- c. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik terutama pengaruh transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Soleha (2014), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten”. Penelitian ini

berjudul “pengaruh transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Variabel Penelitian: penelitian terdahulu menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) dan aktivitas pengendalian (X_2), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu akuntabilitas keuangan (Y). Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu transparansi publik (X_1) dan aktivitas pengendalian (X_2), dan 1 (satu) variabel terikat yaitu akuntabilitas keuangan (Y).
2. Jumlah Observasi/data (n): penelitian terdahulu menggunakan 6 SKPD di Kabupaten/Kota pada Provinsi Banten. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 responden.
3. Waktu Penelitian: penelitian terdahulu dilakukan tahun 2014 sedangkan penelitian ini tahun 2020.
4. Tempat Penelitian: lokasi penelitian terdahulu pada SKPD di Kabupaten/Kota pada Provinsi Banten, sedangkan penelitian ini dilakukan pada OPD di Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Transparansi

Menurut Erlina (2013:66), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. (Chabib, 2010:87).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Dhaka, 2014:45). Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Sekarang ini, negara mengklasifikasikan laporan sebagai *TopSecret*, *Secret*, *Confidential* dan *Restricted*, dan *Official Secrets Acts* membuat *unauthorized*

disclosure terhadap suatu *criminal offence*. Kultur secara umum dibanyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, adalah kerahasiaan (Farzad, et all, 2012:64). Indikator transparansi publik yaitu sebaai berikut:

- a. Transparansi dalam pengelolaan APBD
- b. Keterbukaan alam penerimaan dan penggunaan dana di tiap-tiap SKPD
- c. Kemudahan mengakses data
- d. Sistem komunikasi organisasi

2.1.2 Aktivitas Pengendalian

Istilah pengendalian berasal dari bahasa inggris yaitu “*control*” adalah merupakan salah satu fungsi terpenting dari manajemen. Pengendalian secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya atau seperti apa yang telah direncanakan (Arens, 2010:76). Permasalahan lemahnya pengendalian akan membawa dampak kepada kerugian yang besar dan bahkan kemungkinan terjadinya kegagalan organisasi. Mengingat arti pentingnya, pengendalian hampir selalu disebutkan dalam setiap literature manajemen. Arens (2010:98) menjelaskan, aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan.

Aktivitas pengendalian seharusnya efisien dan efektif, menyajikan kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Aktivias pengendalian meliputi :

- a. Pemisahan fungsi/tugas/ wewenang yang cukup

- b. Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai
- c. Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan
- d. Evaluasi secara independen atas kinerja
- e. Pengendalian terhadap pemrosesan informasi, hal ini berkaitan dengan proses otorisasi, kelengkapan dan keakuratan data keuangan. Pengendalian pemrosesan informasi digolongkan menjadi dua, yaitu :
 - 1) Pengendalian umum
 - 2) Pengendalian aplikasi
- f. Pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan

Di dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk lebih akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksana roda pemerintahan diharapkan lebih terbuka dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran atau kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas pengendalian yang nantinya dibuat menjadi laporan hasil evaluasi dari aktivitas pengendalian dan seterusnya mengkomunikasikan kejadian yang relevan, handal, dan tepat waktu. Indikator aktivitas pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Harus sesuai prinsip akuntansi
- b. Perekrutan dan pengembangan SDM
- c. Tugas prosedur dalam pekerjaan
- d. Kesesuaian
- e. Pemisahan tugas
- f. Independen

2.1.3 Akuntabilitas Keuangan

Menurut Muda (2014), akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara priodik. Secara umum Akuntabilitas dipahami sebagai :

- a. Kewajiban seseorang/lembaga untuk memberikan laporan yang memuaskan atas tindakan sebagai akibat wewenang yang dimiliki/diterima (*satisfactory report*).
- b. Pengukuran tanggungjawab yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan atau dasar lain yang ditentukan sebelumnya (*responsibility*).
- c. Kewajiban membuktikan kinerja yang baik, sesuai dengan ketentuan (hukum, persetujuan atau kebiasaan).

Mengacu pada pemahaman di atas, maka jelas bahwa akuntabilitas memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari responsibilitas, karena dalam akuntabilitas, terkandung dimensi kepuasan dari para pihak (*stakeholders*) yang telah memberikan wewenang kepadanya, serta adanya kewajiban membuktikan bahwa kinerja yang dicapai atas penggunaan wewenang tersebut telah sesuai dengan standar yang telah disetujui sebelumnya.

Selanjutnya sebagaimana dikutip oleh Laura (2015:65) dari Kohler bahwa ada 2 jenis akuntabilitas yaitu :

- a. *Dollar accountability*, berkenaan dengan pendapatan dan pengeluaran, sumber-sumber aktiva dan penggunaannya (akuntabilitas keuangan).

- b. *Operation accountability*, berkenaan dengan tanggungjawab (*responsibility*) seorang administrator untuk menggunakan semua harta dan sumber-sumber secara efisien dan efektif (akuntabilitas administrasi).

Gejala umum yang terjadi dalam perkembangan keuangan daerah di Indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas pemerintah daerah. Pada dasarnya, akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap masyarakat (publik) adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclousure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak daerah, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Governmental Accounting Standards Board (GASB) sebagaimana dikutip oleh Rasdianto (2014:162) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja, tetapi juga kinerja yang telah disepakati bersama dalam hal ini antara eksekutif daerah dan legislatif daerah selaku wakil rakyat di daerah. Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat memberikan informasi untuk membantu pemakai dalam pembuatan

keputusan ekonomi, sosial dan politik. Indikator akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan APBD disajikan terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat
- b. Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan APBD
- c. Proses dan pertanggungjawaban APBD diawasi secara terus menerus
- d. Penyajian APBD telah menyertakan informasi masa lalu
- e. Dalam mengevaluasi APBD hanya memperbandingkan dengan realisasi /sesungguhnya.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian sebelumnya dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama /Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil penelitian
1	Soleha (2014)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten.	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) dan Aktivitas Pengendalian (X_2).	Akuntabilitas Keuangan (Y)	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil yang ada menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian memberikan pengaruh simultan yang positif dan signifikan yaitu mencapai 55,20% terhadap akuntabilitas keuangan.

						Hasil kedua menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan mencapai 20,05% atas akuntabilitas keuangan. Hasil yang ketiga menunjukkan implementasi aktivitas pengendalian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan mencapai 35,15% atas akuntabilitas keuangan..
2	Fathia (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Study Kasus SKPD di Provinsi Riau)	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X_1), Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X_2), Kejelasan Sasaran Anggaran (X_3), Sistem Pelaporan Kinerja (X_4) dan Pengendalian Akuntansi (X_5).	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

						Instansi Pemerintah.
3	Setiyawan (2016)	Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Bungo.	Akuntabilitas Publik (X_1), Transparansi Publik (X_2) dan Pengawasan (X_3).	Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y)	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan, dan pengelolaan keuangan daerah, berpengaruh terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Secara parsial akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan, dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo.

Sumber : Penulis (2020)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian yaitu menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori

yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat.

2.3.1 Transparansi Publik terhadap Akuntabilitas Keuangan

Dalam mengelola keuangan negara, dibutuhkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP. 2008:54).

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyusun paket undang-undang keuangan negara yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2.3.2 Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan

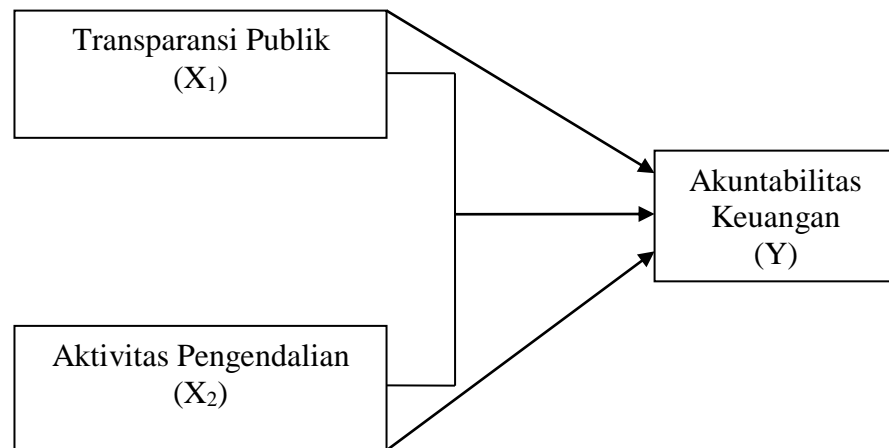
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Torres, 2014:32).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan standar atau acuan dalam melaksanakan tata-kelola dan pertanggungjawaban keuangan, atas pelaksanaan APBN / APBD. Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Kerangka konseptual yang diterjemahkan dalam diagram struktur seperti pada gambar 2.1 :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan penjelasan di atas, dengan demikian penulis menarik sebuah hipotesis yaitu :

1. Transparansi publik berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan.
2. Aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan.

3. Transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi (Sugiyono, 2010).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di OPD di Kota Medan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan selesai, dapat diketahui pada skedul proses penelitian dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Tahun 2019 - 2020									
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Riset Awal/Pengajuan Judul	■	■								
2	Penyusunan Proposal			■	■	■					
3	Seminar Proposal						■				
4	Perbaikan Acc Proposal						■	■			
5	Pengolahan Data							■	■		
6	Penyusunan Skripsi							■	■		
7	Bimbingan Skripsi									■	
8	Sidang meja hijau										■

Sumber: Penulis (2020)

3.3 Populasi dan Sampel/ Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Populasi

Menurut Erlina (2011:78) “Populasi adalah sekelompok entitas yang lengkap yang dapat berupa orang, kejadian, atau benda yang mempunyai karakteristik tertentu, yang berada dalam suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di OPD di Kota Medan.

3.3.2 Sampel

Menurut Erlina (2011:79), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling* yaitu non-probabilitas sampling teknik dimana subyek dipilih karena aksesibilitas nyaman, kedekatan mereka kepada peneliti dan secara kebetulan. Subyek dipilih hanya karena mereka paling mudah untuk merekrut studi dan peneliti tidak mempertimbangkan memilih responden yang mewakili seluruh populasi. Rincian kecamatan sebagai sampel dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Daftar Sampel di OPD Kota Medan

No	OPD	Sampel Responden
1	Dinas Pekerjaan Umum	3
2	Dinas Sosial	3
3	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	3
4	Dinas Pencegahan dan Pemadan Kebakaran	3
5	Dinas Ketenagakerjaan	3
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3
7	Dinas Perhubungan	3
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3
9	Dinas Pariwisata	3
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3
Jumlah		30

Sumber : OPD Kota Medan (2020)

Kriteria penelitian yang dilakukan di 10 OPD di Kota Medan yaitu Bagian Keuangan, Bendahara dan Pimpinan.

3.3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data di dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas yaitu: transparansi publik (X_1), aktivitas pengendalian (X_2), serta variabel terikat yaitu akuntabilitas keuangan (Y).

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan definisi atau gabungan keduanya, yang ada di lapangan.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Akuntabilitas Keuangan (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan APBD disajikan terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat 2. Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan APBD 3. Proses dan pertanggungjawaban APBD diawasi secara terus menerus 4. Penyajian APBD telah menyertakan informasi masa lalu. 5. Dalam mengevaluasi APBD hanya membandingkan dengan realisasi /sesungguhnya (Muda, 2014). 	Pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. (Muda, 2014)	Likert
Transparansi Publik (X_1)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Transparansi dalam pengolahan APBD 2 Keterbukaan alam penerimaan dan penggunaan dana di tiap-tiap SKPD 3 Kemudahan mengakses data 	Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada	Likert

	Sistem komunikasi organisasi (Erlina, 2013:66).	masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (Erlina, 2013:66).	
Aktivitas Pengendalian (X ₂)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus sesuai prinsip akuntansi 2. Perekrutan dan pengembangan SDM 3. Tugas prosedur dalam pekerjaan 4. Kesesuaian 5. Pemisahan tugas 6. Independen (Aren, 2010:76) 	Memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya atau seperti apa yang telah direncanakan (Aren, 2010:76).	Likert

Sumber : Penulis, (2020)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Erlina (2011:83), Teknik pengumpulan pengumpulan data merupakan suatu cara yang sistematis dan objektif untuk memperoleh atau mengumpulkan keterangan-keterangan yang bersifat lisan maupun tulisan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan angket yaitu kuisisioner langsung, yaitu daftar pertanyaan dikirim atau diserahkan langsung kepada orang yang di mintai pendapat, keyakinan atau diminta menceritakan tentang dirinya sendiri.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Kualitas Data

3.6.1.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2015:88), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk kuesioner tersebut. Persyaratan uji validitas setiap pertanyaan $> 0,30$ maka butir pertanyaan dianggap valid.

3.6.1.2 Uji Reliabilitas (kehandalan)

Menurut Ghozali (2015:89), “uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk”. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran variabel-variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu.

Dalam penelitian ini berarti reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan beberapa kali. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menghitung cronbach alpha masing-masing item dengan bantuan *SPSS for windows*. Suatu instrument dikatakan reliabel jika mempunyai nilai alpha positif dan lebih besar dari 0,6. Dimana semakin besar nilai alpha, maka alat pengukur yang digunakan semakin handal (reliabel).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan regresi terdapat syarat yang harus dilalui yaitu melakukan uji asumsi klasik. Model regresi harus bebas dari asumsi klasik yaitu, uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas (Ghozali, 2015:90).

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel peganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2015:91). Syarat dalam analisis parametik yaitu data harus normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2015 : 91). Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. *Variance Inflation Factor* (VIF) = $1/\text{Tolerance}$, jika VIF = 10 maka $1/10 = 0.1$.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain jika variance dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2015). Dasar analisis yaitu sebagai berikut :

- 1) Dengan melihat apakah titik-titik memiliki pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, jika terjadi maka mengindikasikan terdapat heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka mengindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas.

3.6.3 Model Pengujian Hipotesis

3.6.3.1 Regresi Linier Berganda

Model Regresi Linear Berganda (*Multiple Regression Analysis*), bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas (independen). Dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas (independen) dalam membuat persamaan regresi diharapkan mampu menerangkan lebih baik karakteristik dari variabel tak bebas (dependen) dan nilai koefisien determinasi diharapkan semakin besar dan nilai standar eror semakin kecil sehingga persamaan regresi yang dihasilkan lebih baik. Model regresi linear berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik, baik multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Model persamaanya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Keuangan (*Dependent Variabel*)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

X_1 = Transparansi Publik (*Independent Variabel*)

X_2 = Aktivitas Pengendalian (*Independent Variabel*)

ϵ = error

3.6.3.2 Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji Signifikan Parsial (Uji-t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak (Priyatno, 2015:103). Hipotesis nol, atau H_0 : $b_i = 0$, artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau H_a : $b_i \neq 0$, artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yaitu :

- 1) Jika nilai signifikan $> \alpha$ (0,05), H_0 diterima
- 2) Jika nilai signifikan $< \alpha$ (0,05), H_0 ditolak.

3.6.3.3 Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji signifikan (Uji-F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Priyatno, 2015). Hipotesis nol (H_0) yang hendaknya diuji apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau : H_0 : $b_1 = b_2 = b_3 = 0$, artinya apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel

dependen. Hipotesis alternatif (H_a) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau $H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelasan yang signifikan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen.

- 1) Jika nilai signifikan $> \alpha$ (0,05), H_0 diterima
- 2) Jika nilai signifikan $< \alpha$ (0,05), H_0 ditolak

3.6.3.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi terletak pada tabel summary dan tertulis *R Square* yang disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square* yang disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square*, karena disesuaikan dengan jumlah *Square* variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Nilai *R Square* dikatakan baik jika di atas 0,5 karena nilai *R Square* berkisar antara 0 sampai 1.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Pemerintahan Kota Medan

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar di Pulau Sumatera. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dan juga sebagai pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata Brastagi di daerah dataran tinggi Karo, objek wisata Orangutan di Bukit Lawang, Danau Toba. Medan didirikan oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada tahun 1590. *John Anderson*, orang Eropa yang pertama mengunjungi Deli pada tahun 1833 menemukan sebuah kampung yang bernama Medan. Kampung ini berpenduduk 200 orang dan seorang pemimpin bernama Tuanku Pulau Berayan sudah sejak beberapa tahun bermukim disana untuk menarik pajak dari sampan-sampan pengangkut lada yang menuruni sungai. Pada tahun 1886, Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota, dan tahun berikutnya residen Pesisir Timur serta Sultan Deli pindah ke Medan. Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa, dua orang bumiputra, dan seorang Tionghoa.

Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terdapat dua gelombang migrasi besar ke Medan. Gelombang pertama berupa kedatangan orang Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan. Tetapi setelah tahun 1880 perusahaan

perkebunan berhenti mendatangkan orang Tionghoa, karena sebagian besar dari mereka lari meninggalkan kebun dan sering melakukan kerusuhan. Perusahaan kemudian sepenuhnya mendatangkan orang Jawa sebagai kuli perkebunan. Orang-orang Tionghoa bekas buruh perkebunan kemudian didorong untuk mengembangkan sektor perdagangan. Gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing dan Aceh. Mereka datang ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, tetapi untuk berdagang, menjadi guru dan ulama.

Sejak tahun 1950, Medan telah beberapa kali melakukan perluasan areal, dari 1.853 ha menjadi 26.510 ha di tahun 1974. Dengan demikian dalam tempo 25 tahun setelah penyerahan kedaulatan, kota Medan telah bertambah luas hampir delapan belas kali lipat. Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat.

Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan. Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan

4.1.2 Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang akan diuraikan berikut ini mencerminkan bagaimana keadaan responden yang diteliti meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan masa kerja.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 4.1
Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	15	50.0	50.0	50.0
	Perempuan	15	50.0	50.0	100.0
Total		30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai OPD di Kota Medan yang menjadi responden adalah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 50.0% dari total responden.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.

Tabel 4.2
Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-30 Tahun	2	6.7	6.7	6.7
31-40 Tahun	9	30.0	30.0	36.7
41-50 Tahun	9	30.0	30.0	66.7
51-58 Tahun	10	33.3	33.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai OPD di Kota Medan yang menjadi responden berusia 51-58 tahun, yaitu sebanyak 10 orang atau sebesar 33.3% dari total responden.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.

Tabel 4.3
Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid D3	16	53.3	53.3	53.3
S1	13	43.3	43.3	96.7
S2	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Tabel 4.3 memberikan informasi dilihat bahwa mayoritas pegawai OPD di Kota Medan yang menjadi responden memiliki pendidikan terakhir D3 yaitu sebanyak 16 orang atau sebesar 53.3% dari total responden.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.

Tabel 4.4
Masa Kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-5 Tahun	8	26.7	26.7	26.7
11-15 Tahun	3	10.0	10.0	36.7
16-20 Tahun	3	10.0	10.0	46.7
6-10 Tahun	16	53.3	53.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai OPD di Kota Medan yang menjadi responden memiliki masa kerja 6 – 10 tahun yaitu sebanyak 16 orang atau sebesar 53.3% dari total responden.

4.1.3 Penyajian Data

Penelitian ini 3 (tiga) variabel bebas yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian, serta 1 (satu) variabel terikat yaitu akuntabilitas keuangan. Penyebaran angket, masing-masing butir pernyataan dari setiap variabel harus di isi oleh responden yang berjumlah 30 orang. Jawaban angket disediakan dalam 5 alternatif jawaban, yaitu:

- a. Sangat Setuju (SS) dengan skor 5
- b. Setuju (S) dengan skor 4
- c. Ragu-Ragu (R) dengan skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) dengan skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1

Adapun jawaban-jawaban dari responden yang diperoleh akan ditampilkan pada tabel-tabel berikut:

a. Transparansi Publik (X₁)

Tabel 4.5
Pengumuman kebijakan APBD mudah didapatkan oleh publik.
Pernyataan X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	6.7	6.7	6.7
	Tidak Setuju	6	20.0	20.0	26.7
	Ragu-Ragu	6	20.0	20.0	46.7
	Setuju	12	40.0	40.0	86.7
	Sangat Setuju	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 4 orang (13.3%), setuju sebanyak 12 orang (40.0%), ragu-ragu sebanyak 6 orang (20.0%), tidak setuju sebanyak 6 orang (20.0%) dan sebanyak 2 orang (6.7%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 12 orang (40.0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa pengumuman kebijakan apbd mudah didapatkan oleh publik.

Tabel 4.6
Pengumuman tentang APBD bisa didapat setiap waktu.

Pernyataan X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	11	36.7	36.7	36.7
	Setuju	10	33.3	33.3	70.0
	Sangat Setuju	9	30.0	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang (30.0%), setuju sebanyak 10 orang (33.3%) dan sebanyak 11 orang (36.7%) responden yang menyatakan ragu-ragu. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 11 orang (36.7%). Jadi dapat disimpulkan responden masih ada yang menyatakan setuju bahwa pengumuman tentang apbd bisa didapat setiap waktu.

Tabel 4.7
Musyawarah Perencanaan Pembangunan dapat meningkatkan kebijakan
transparansi APBD.

Pernyataan X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	6.7	6.7	6.7
	Tidak Setuju	2	6.7	6.7	13.3
	Ragu-Ragu	11	36.7	36.7	50.0
	Setuju	13	43.3	43.3	93.3
	Sangat Setuju	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang (6.7%), setuju sebanyak 13 orang (43.3%), ragu-ragu sebanyak 11 orang (36.7%), tidak setuju sebanyak 2 orang (6.7%) dan sebanyak 2 orang (6.7%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 13 orang (43.3%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa musyawarah perencanaan pembangunan dapat meningkatkan kebijakan transparansi apbd.

Tabel 4.8
Menurut saya, pengumuman pengelolaan APBD kepada masyarakat dapat meningkatkan tranparansi.

Pernyataan X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	13	43.3	43.3	43.3
	Setuju	15	50.0	50.0	93.3
	Sangat Setuju	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang (6.7%), setuju sebanyak 15 orang (50.0%) dan sebanyak 13 orang (43.3%) responden yang menyatakan ragu-ragu. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 15 orang (50.0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa menurut saya, pengumuman pengelolaan apbd kepada masyarakat dapat meningkatkan tranparansi.

Tabel 4.9

Sistem komunikasi organisasi pada pemerintahan harus melakukan sosialisasi program kebijakan kepada masyarakat secara terbuka.

Pernyataan X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	6	20.0	20.0	20.0
	Ragu-Ragu	5	16.7	16.7	36.7
	Setuju	6	20.0	20.0	56.7
	Sangat Setuju	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (43.3%), setuju sebanyak 6 orang (20.0%), ragu-ragu sebanyak 5 orang (16.7%), dan sebanyak 6 orang (20.0%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (43.3%). Jadi dapat disimpulkan

responden sangat setuju bahwa sistem komunikasi organisasi pada pemerintahan harus melakukan sosialisasi program kebijakan kepada masyarakat secara terbuka.

Tabel 4.10
Produk anggaran sebagai hasil kerja yang dijalankan oleh unit kerja selalu dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Pernyataan X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	6.7	6.7	6.7
	Ragu-Ragu	6	20.0	20.0	26.7
	Setuju	9	30.0	30.0	56.7
	Sangat Setuju	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (43.3%), setuju sebanyak 9 orang (30.0%), ragu-ragu sebanyak 6 orang (20.0%) dan sebanyak 2 orang (6.7%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang (43.3%). Jadi dapat disimpulkan responden sangat setuju bahwa produk anggaran sebagai hasil kerja yang dijalankan oleh unit kerja selalu dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Tabel 4.11

Dampak nyata dari hasil kinerja partisipasi penyusunan anggaran dapat memberikan kontribusi yang memadai kepada masyarakat / publik, sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari unit kerja masing – masing.

Pernyataan X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	3.3	3.3	3.3
	Tidak Setuju	5	16.7	16.7	20.0
	Ragu-Ragu	10	33.3	33.3	53.3
	Setuju	9	30.0	30.0	83.3
	Sangat Setuju	5	16.7	16.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 5 orang (16.7%), setuju sebanyak 9 orang (30.0%), ragu-ragu sebanyak 10 orang (33.3%) tidak setuju sebanyak 5 orang (16.7%) dan sebanyak 1 orang (3.3%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 10 orang (33.3%). Jadi dapat disimpulkan responden ragu-ragu bahwa dampak nyata dari hasil kinerja partisipasi penyusunan anggaran dapat memberikan kontribusi yang memadai kepada masyarakat / publik, sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari unit kerja masing – masing.

b. Aktivitas Pengendalian (X₂)

Tabel 4.12

Setiap transaksi pembelanjaan terdapat nota pembayaran yang disetujui dengan dokumen pendukung untuk setiap cek yang disiapkan.

Pernyataan X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	13.3	13.3	13.3
	Ragu-Ragu	12	40.0	40.0	53.3
	Setuju	14	46.7	46.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46.7%), ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%) dan sebanyak 4 orang (13.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46.7%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa setiap transaksi pembelanjaan terdapat nota pembayaran yang disetujui dengan dokumen pendukung untuk setiap cek yang disiapkan.

Tabel 4.13
Pemilihan prinsip akuntansi dan pengembangan estimasi akuntansi konsisten dengan tujuan dan pelaporan yang wajar.

Pernyataan X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	13.3	13.3	13.3
	Ragu-Ragu	12	40.0	40.0	53.3
	Setuju	14	46.7	46.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46.7%) ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%) dan sebanyak 4 orang (13.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46.7%). Jadi dapat disimpulkan responden masih ada yang menyatakan setuju bahwa pemilihan prinsip akuntansi dan pengembangan estimasi akuntansi konsisten dengan tujuan dan pelaporan yang wajar.

Tabel 4.14

Kebijakan dan prosedur personel yang ada menghasilkan perekrutan atau pengembangan orang yang berkompeten dan dapat dipercaya yang diperlukan untuk mendukung struktur pengendalian intern yang efektif.

Pernyataan X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	6	20.0	20.0	20.0
	Ragu-Ragu	12	40.0	40.0	60.0
	Setuju	12	40.0	40.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 12 orang (40.0%), ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%) dan sebanyak 6 orang (20.0%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju dan ragu-ragu sebanyak

12 orang (40.0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju dan ragu-ragu bahwa kebijakan dan prosedur personel yang ada menghasilkan perekrutan atau pengembangan orang yang berkompeten dan dapat dipercaya yang diperlukan untuk mendukung struktur pengendalian intern yang efektif.

Tabel 4.15
Personel harus memahami tugas prosedur dalam pekerjaan mereka masing – masing.

Pernyataan X2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	5	16.7	16.7	16.7
Ragu-Ragu	12	40.0	40.0	56.7
Setuju	12	40.0	40.0	96.7
Sangat Setuju	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (3.3%), setuju sebanyak 12 orang (40.0%), ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%) dan sebanyak 5 orang (16.7%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju dan ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju dan ragu-ragu bahwa personel harus memahami tugas prosedur dalam pekerjaan mereka masing – masing.

Tabel 4.16
Pengecekan independen atas kesesuaian iktisar cek harian yang diterbitkan dengan jurnal untuk pengeluaran kas.

Pernyataan X2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	5	16.7	16.7	16.7
Ragu-Ragu	14	46.7	46.7	63.3
Setuju	10	33.3	33.3	96.7
Sangat Setuju	1	3.3	3.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (3.3%), setuju sebanyak 10 orang (33.3%), ragu-ragu sebanyak 14 orang (46.7%) dan sebanyak 5 orang (16.7%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 14 orang (46.7%). Jadi dapat disimpulkan responden ragu-ragu bahwa pengecekan independen atas kesesuaian iktisar cek harian yang diterbitkan dengan jurnal untuk pengeluaran kas.

c. Akuntabilitas Keuangan (Y)

Tabel 4.17
Pengelolaan APBD disajikan terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
Pernyataan Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	13.3	13.3	13.3
	Ragu-Ragu	9	30.0	30.0	43.3
	Setuju	17	56.7	56.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 17 orang (56.7%), ragu-ragu sebanyak 9 orang (30.0%), dan sebanyak 4 orang (13.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 17 orang (56.7%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa pengelolaan apbd disajikan terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.

Tabel 4.18
Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan APBD.

Pernyataan Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	6	20.0	20.0	20.0
	Ragu-Ragu	12	40.0	40.0	60.0
	Setuju	12	40.0	40.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 12 orang (40.0%), ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%), dan sebanyak 6 orang (20.0%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju dan ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju dan ragu-ragu bahwa saya mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan beban kerja yang diberikan.

Tabel 4.19
Proses dan pertanggungjawaban APBD diawasi secara terus menerus.

Pernyataan Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	5	16.7	16.7	16.7
	Ragu-Ragu	12	40.0	40.0	56.7
	Setuju	12	40.0	40.0	96.7
	Sangat Setuju	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (3.3%), setuju sebanyak 12 orang (40.0%), ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%) dan sebanyak 5 orang (16.7%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju dan ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%). Jadi dapat

disimpulkan responden setuju dan ragu-ragu bahwa proses dan pertanggungjawaban apbd diawasi secara terus menerus.

Tabel 4.20
Penyajian APBD telah menyertakan informasi masa lalu.
Pernyataan Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	13.3	13.3	13.3
	Ragu-Ragu	13	43.3	43.3	56.7
	Setuju	12	40.0	40.0	96.7
	Sangat Setuju	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang (3.3%), setuju sebanyak 12 orang (40.0%), ragu-ragu sebanyak 13 orang (43.3%) dan sebanyak 4 orang (13.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban responden paling banyak adalah yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 13 orang (43.3%). Jadi dapat disimpulkan responden ragu-ragu bahwa penyajian APBD telah menyertakan informasi masa lalu.

Tabel 4.21
Evaluasi APBD hanya memperbandingkan dengan realisasi /sesungguhnya.
Pernyataan Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	13.3	13.3	13.3
	Ragu-Ragu	12	40.0	40.0	53.3
	Setuju	14	46.7	46.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, didapat data bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46.7%), ragu-ragu sebanyak 12 orang (40.0%) dan sebanyak 4 orang (13.3%) responden yang menyatakan tidak setuju. Dari jawaban

responden paling banyak adalah yang menyatakan setuju sebanyak 14 orang (46.7%). Jadi dapat disimpulkan responden setuju bahwa evaluasi APBD hanya membandingkan dengan realisasi /sesungguhnya.

4.1.4 Analisis dan Evaluasi

a. Pengujian Validitas

Untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar angket yang telah disajikan pada responden maka perlu dilakukan uji validitas. Apabila validitas setiap pertanyaan lebih besar ($>$) 0,30, maka butir pertanyaan dianggap valid.

Tabel 4.22
Uji Validitas (X_1) Transparansi Publik
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X1.1	22.3000	11.941	.475	.648
Pernyataan X1.2	21.7000	14.148	.359	.680
Pernyataan X1.3	22.2667	13.857	.318	.690
Pernyataan X1.4	22.0000	15.034	.347	.686
Pernyataan X1.5	21.7667	11.702	.481	.647
Pernyataan X1.6	21.5333	13.775	.333	.686
Pernyataan X1.7	22.2333	11.702	.577	.618

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Dari tabel 4.22 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 7 (tujuh) butir pertanyaan pada variabel transparansi publik dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.23
Uji Validitas (X₂) Aktivitas Pengendalian
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan X2.1	13.0667	5.651	.782	.787
Pernyataan X2.2	13.0667	5.651	.782	.787
Pernyataan X2.3	13.2000	5.890	.631	.826
Pernyataan X2.4	13.1000	6.162	.509	.860
Pernyataan X2.5	13.1667	5.868	.622	.828

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Dari tabel 4.23 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel aktivitas pengendalian dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

Tabel 4.24
Uji Validitas (Y) Akuntabilitas Keuangan
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan Y.1	13.1667	6.006	.441	.825
Pernyataan Y.2	13.4000	5.283	.643	.768
Pernyataan Y.3	13.3000	5.183	.635	.770
Pernyataan Y.4	13.2667	4.961	.762	.730
Pernyataan Y.5	13.2667	5.720	.554	.794

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Dari tabel 4.24 di atas hasil *output* SPSS diketahui nilai validitas terdapat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* yang artinya nilai korelasi antara skor setiap butir dengan skor total pada tabulasi jawaban responden. Hasil uji validitas dari 5 (lima) butir pertanyaan pada variabel akuntabilitas keuangan dapat dinyatakan valid (sah) karena semua nilai koefisien lebih besar dari 0,30.

b. Pengujian Reliabilitas

Angket dikatakan reliabel jika *alpha cronbach* $> 0,60$ dan tidak reliabel jika sama dengan atau dibawah $0,60$.

Tabel 4.25
Uji Reliabilitas (X_1) Transparansi Publik

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.700	7

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Dari tabel 4.25 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,700 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 7 butir pernyataan pada variabel transparansi publik adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.26
Uji Reliabilitas (X_2) Aktivitas Pengendalian

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.849	5

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Dari tabel 4.26 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,849 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel aktivitas pengendalian adalah reliabel atau dikatakan handal.

Tabel 4.27
Uji Reliabilitas (Y) Akuntabilitas Keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.815	5

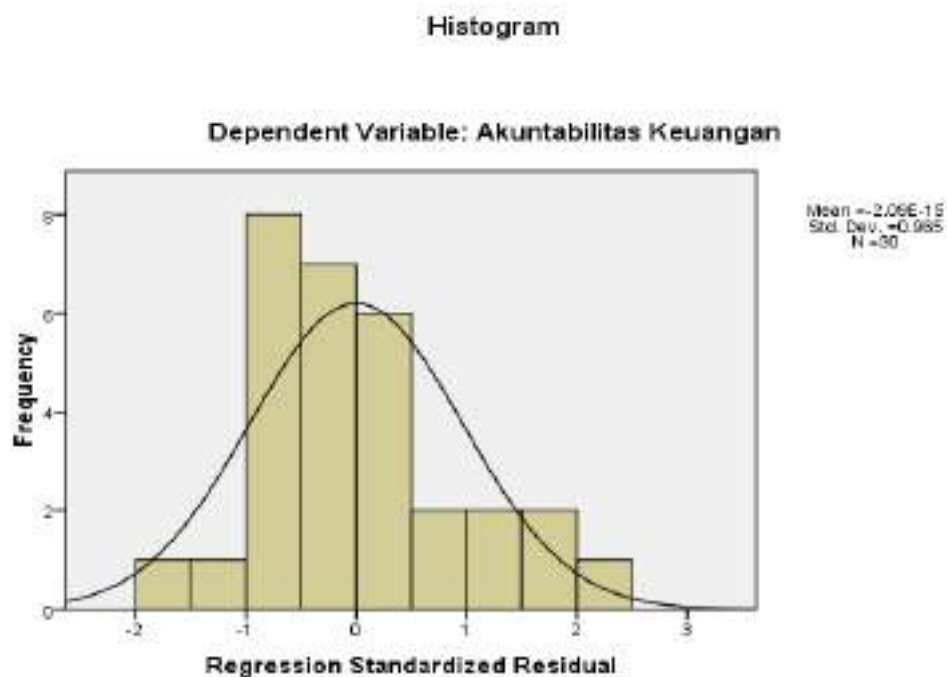
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Dari tabel 4.27 di atas, hasil *output* SPSS diketahui nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,815 > 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang telah disajikan kepada responden yang terdiri dari 5 butir pernyataan pada variabel akuntabilitas keuangan adalah reliabel atau dikatakan handal.

4.1.5 Pengujian Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel peganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati normal.

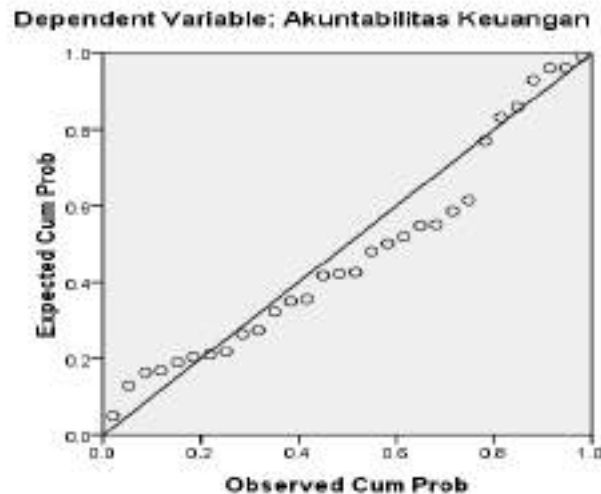


Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Dari kedua gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas data, data untuk variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, aktivitas pengendalian dan akuntabilitas keuangan berdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinieritas

Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. *Variance Inflation Factor* (VIF) = $1/\text{Tolerance}$, jika VIF = 0 maka $1/10 = 0.1$.

Uji Multikolinieritas dari hasil angket yang telah didistribusikan kepada responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.28
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.030	1.236	-.024	.981		
	Transparansi Publik	.165	.053	3.083	.005	.688	1.453
	Aktivitas Pengendalian	.757	.074	10.186	.000	.688	1.453

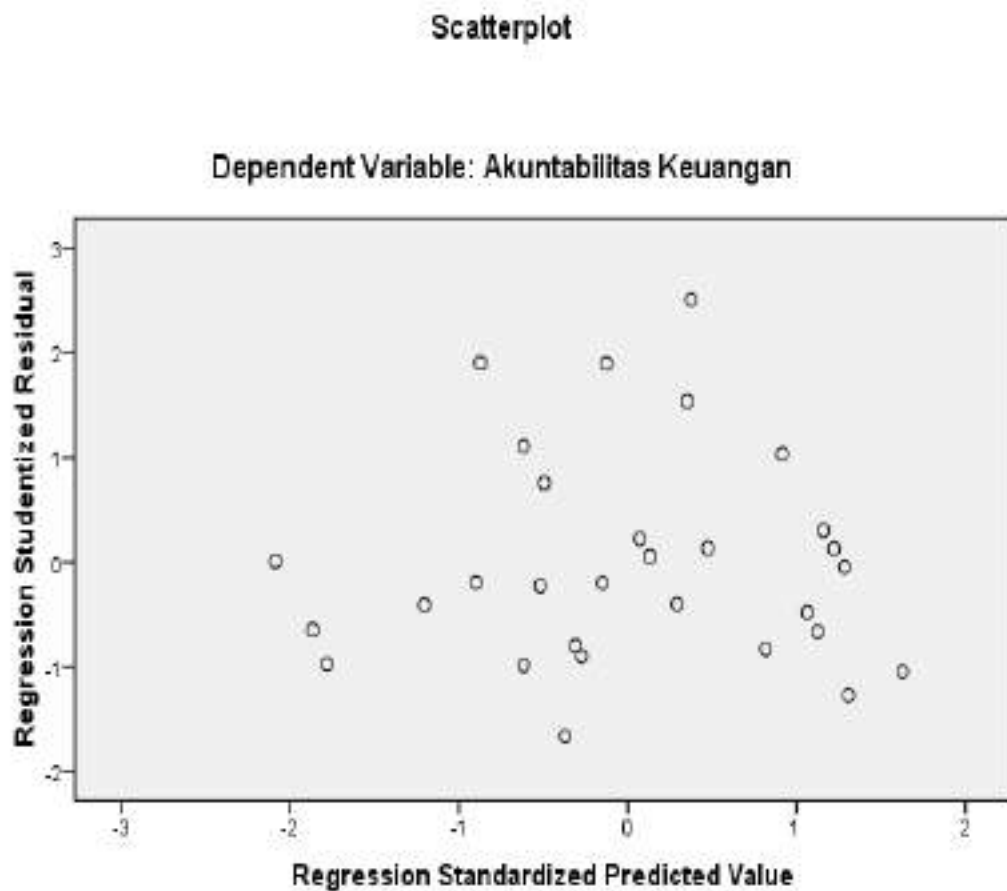
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.28 di atas dapat dilihat bahwa angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah transparansi publik $1,453 < 10$ dan aktivitas pengendalian $1,453 < 10$, serta nilai *Tolerance* transparansi publik $0,688 > 0,10$ dan aktivitas pengendalian $0,688 > 0,10$ sehingga terbebas dari multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain jika variance dari residual satu pengamatan ke-pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2008).



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Gambar 4.3 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, gambar *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan perkataan lain: variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

4.1.6 Pengujian Hipotesis

a. Regresi Linier Berganda

Model Regresi Linear Berganda (*Multiple Regression Analysis*), bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel bebas (Independen). Rumus analisis regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 4.29
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.030	1.236	-.024	.981		
	Transparansi Publik	.165	.053	3.083	.005	.688	1.453
	Aktivitas Pengendalian	.757	.074	10.186	.000	.688	1.453

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.29 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut $Y = -0,030 + 0,165 X_1 + 0,757 X_2$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap nol maka nilai akuntabilitas keuangan (Y) adalah sebesar -0,030.
- Jika terjadi peningkatan transparansi publik sebesar 1, maka akuntabilitas keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,165.
- Jika terjadi peningkatan aktivitas pengendalian sebesar 1, maka akuntabilitas keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,757.

4.1.7 Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji signifikan (Uji-F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Priyatno, 2009). Cara yang digunakan adalah dengan melihat *level of significant* ($=0,05$). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.30
Uji Simultan
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	209.009	2	104.505	107.735	.000^a
	Residual	26.191	27	.970		
	Total	235.200	29			

a. Predictors: (Constant), Aktivitas Pengendalian, Transparansi Publik

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.30 di atas dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 107,482 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,35 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$ (lihat lampiran tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini transparansi publik dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Maka hipotesis sebelumnya adalah Terima H_a (tolak H_0) atau hipotesis diterima.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Signifikan Parsial (Uji-t) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.

Tabel 4.31
Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.030	1.236	-.024	.981		
	Transparansi Publik	.165	.053	3.083	.005	.688	1.453
	Aktivitas Pengendalian	.757	.074	10.186	.000	.688	1.453

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.31 diatas dapat dilihat bahwa:

- 1) Pengaruh transparansi publik terhadap akuntabilitas keuangan.

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} 3,083 > t_{tabel} 2,051$ dan signifikan $0,005 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan transparansi publik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan.

- 2) Pengaruh aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan.

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} 10,186 > t_{tabel} 2,051$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan.

c. Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi terletak pada tabel summary dan tertulis *R Square* yang disesuaikan

atau tertulis *Adjusted R Square* yang disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square*, karena disesuaikan dengan jumlah *Square* variabel independen yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.32
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.943 ^a	.889	.880	.98490

a. Predictors: (Constant), Aktivitas Pengendalian, Transparansi Publik

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0, Data, Diolah Penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.32 di atas dapat dilihat bahwa angka *Adjusted R Square* 0,880 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 88,0% akuntabilitas keuangan dapat diperoleh dan dijelaskan oleh transparansi publik dan aktivitas pengendalian. Sedangkan sisanya $100\% - 88,0\% = 12,0\%$ dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model, seperti penerapan anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan kinerja, pengawasan dan lain-lain.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} 3,083 > t_{tabel} 2,051$ dan signifikan $0,005 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan transparansi publik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan. Dalam mengelola keuangan negara, dibutuhkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Setiyawan (2016), yang menunjukkan bahwa transparansi publik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan.

4.2.2 Pengaruh Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil menunjukkan bahwa $t_{hitung} 10,186 > t_{tabel} 2,051$ dan signifikan $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan.. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan standar atau acuan dalam melaksanakan tata-kelola dan pertanggungjawaban keuangan, atas pelaksanaan APBN / APBD. Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Soleha (2014), yang menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan.

4.2.3 Pengaruh Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 107,482 sedangkan F_{tabel} sebesar 3,35 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$ (lihat lampiran tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini transparansi publik dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Maka hipotesis sebelumnya adalah Terima H_a (tolak H_0) atau hipotesis diterima. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan, serta sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Setiyawan (2016) dan Soleha (2014), yang menunjukkan bahwa transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan.
2. Aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan.
3. Transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan pada OPD di Kota Medan.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat disampaikan kepada pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi organisasi disarankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam bidang akuntansi dan pengelola keuangan negara melalui meminta bantuan tenaga akuntan, merekrut tenaga-tenaga akuntan, mengirimkan pejabatnya pada berbagai perguruan tinggi yang memiliki jurusan akuntansi ataupun berbagai pelatihan bimbingan teknis kedinasan dan mengenai akuntansi administrasi keuangan Negara.

2. Bagi organisasi, supaya memperhatikan para pengelola keuangan daerah sebagai salah satu bentuk usaha organisasi publik meningkatkan peningkatan kinerja. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang diantaranya adalah dengan penempatan personil yang tepat, pemberian *reward* bagi yang berprestasi, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan jenjang pendidikan dengan memberikan kesempatan untuk studi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah, N. (2020). *The Role Of E-Filing In Improving Taxpayer Compliance In Indonesia. Accounting and Business Journal*, 2(1), 1-9.
- Arens, Alvin A, and James K. Loebbecke. (2010). *Auditing and Assurance Services – An Integrated Approach*. New York: Pearson Education.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode *Practice Rehearsal Pairs* pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Chabib, Soleh dan Rochmansjah, Heru. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus media.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 156-166.
- Dhaka, (2014). *Ensuring Transparency and Accountability in Financial Sector*. The Financial Express.
- Erlina dan Rasdiato, (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Brama Ardian. Medan.
- Erlina, (2011). *Metodologi Penelitian*, USU Press, Medan.
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.
- Farzad, Kamran and Mostafa, (2012). "Public Accountability and Government Financial Reporting", *African Journal of Bussiness Management* Vol 6 (29), pp.8475-8482.

- Fathia, Nurul. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Study Kasus SKPD di Provinsi Riau). Universitas Pekanbaru. JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.
- Ghozali. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Noviani, N. (2020). Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 1-17.
- Keputusan Menteri Keuangan No.355 / KMK07 Tahun 2001, Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Laura & Manuel, (2015). "Determining Factors Of Transparency And Accountability in Local Governments: A Meta-Analytic Study". Journal Of Local Self-Government: Lex Localis.
- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Muda, I., & Rasdianto, M. S. L. (2014). Implementation of the Cash Revenue System: A Case Study in the Local Government Task Forces' Units of North Sumatera Province, Indonesia. *Information Management & Business Review*, 6(2).
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Nasution, N. A., & Sari, W. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 76-83.
- Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2004, tentang Standar Akuntansi

- Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Pasal 2, tentang instrumen pelaksanaan pemberhentian kepala daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903 / 2735/SJ tanggal 17 November 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001.
- Priyatno, Duwi, (2015). *SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*. Gava Media, Yogyakarta.
- Rasdianto, N., & Muda, I. (2014). Analysis on the Timeliness of the Accountability Report by the Treasurer Spending in Task Force Units in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 4(4), 176-190.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index*. *Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.

- Setiyawan, Hari Eka. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Bungo. Universitas Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 1, Juli-September 2016 ISSN: 2338-4603 (print); 2355-8520 (online).
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden *Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 60-77.
- Soleha, Nurhayati. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 1 April 2014.
- Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*; Penerbit : CV Alfabeta, Bandung.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 10(1), 115-130.
- Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903 / 2735 / SJ tanggal 17 November 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001
- Torres, Lourdes. (2014). *Accounting and Accountability: Recent Developments In Government Financial Information Systems*, University of Zaragoza, Spain.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 5 Tahun 1975, tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975, Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah-Daerah.

Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.